

KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PARIWISATA (*COMMUNITY BASED TOURISM*)

1. Pendahuluan

Tantangan yang dihadapi umat manusia dewasa ini adalah perubahan peradaban yang terjadi dalam waktu cepat, dengan skala besar dan secara substansi mendasar. Michell, dkk. (2000) mengupas lebih jauh bahwa perubahan menimbulkan kompleksitas, ketidakpastian dan konflik sebagai peluang tetapi juga sekaligus mendatangkan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan menimbulkan perubahan keadaan dan pergeseran peran pelaku, ada yang diuntungkan dan dirugikan.

Kepariwisata sebagai salah satu kegiatan pembangunan diupayakan dapat sejalan dengan konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan, perlu menerapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Pengembangan pariwisata berorientasi jangka panjang dan menyeluruh (*holistic*) tidak hanya memanfaatkan tetapi sekaligus melestarikan obyek dan daya tarik wisata yang memberikan manfaat secara adil bagi semua.
2. Pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter wilayah, kondisi lingkungan, konteks sosial dan dinamika budaya.
3. Penciptaan keselarasan, sinergitas antara kebutuhan wisatawan dan penyedia oleh masyarakat lokal, yang memunculkan hubungan timbal balik dan saling menghargai nilai, adat istiadat, kebiasaan, warisan, budaya, dan lain-lain.

4. Pemanfaatan sumber daya pariwisata yang memperhitungkan kemampuan kelestariannya yang pengelolaannya secara *eco-efficiency (reduce, reuse, dan recyle)* sehingga mencapai *eco-effectivity (redistribute, reactual)*.
5. Pengelolaan kegiatan pariwisata yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi dari kedua sisi permintaan (pasar) dan penawaran (produk).

Pariwisata berbasis masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development paradigma*) pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global.

Dari beberapa ulasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata dimana masyarakat atau warga setempat memainkan peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka.

Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat terkandung didalamnya adalah konsep pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan

kondisi suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

Dalam mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui berbagai macam strategi. Salah satu strategi yang memungkinkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang secara konseptual memiliki ciri-ciri uni serta sejumlah karakter yang oleh Nasikun (2000:26-27) dikemukakan sebagai berikut:

1. Pariwisata berbasis masyarakat menemukan rasionalitasnya dalam properti dan ciri-ciri unik dan karakter yang lebih unik diorganisasi dalam skala yang kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan, secara ekologis aman, dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata konvensional
2. Pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal.
3. Berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya lebih dari pariwisata konvensional, dimana komunitas lokal melibatkan diri dalam menikmati keuntungan perkembangan pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

Tantangan mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat adalah memerlukan pemberdayaan masyarakat yang sungguh-sungguh dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat secara partisipatif muncul sebagai alternatif terhadap pendekatan pembangunan yang serba sentralistik dan bersifat top down.

Munculnya proses partisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendasarkan atas dua perefektif, *Pertama*; pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan, program yang akan mewarnai kehidupan masyarakat. *Kedua*; partisipasi transformasional sebagai tujuan untuk mengubah kondisi lemah dan marjinal menjadi berdaya dan mandiri.

2. Tujuan

1. Pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan suasana, kondisi atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang dan dapat berperan aktif dalam pembangunan keberdayaan dan kepariwisataan secara berkelanjutan.
2. Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri yang meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

3. Sasaran

1. Masyarakat yang memiliki kepedulian dalam pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan
2. Masyarakat dan organisasi non pemerintahan yang mengelola kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan
3. Masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak dalam usaha penunjang kebudayaan dan kepariwisataan.

4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pariwisata merupakan konsep yang mudah dilontarkan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan,

HAND OUT MATA KULIAH CONCEPT RESORT AND LEISURE, STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RESORT AND LEISURE

GUMELAR S. SASTRAYUDA (2010)

karena konsep ini merupakan suatu konsep yang holistik dan terus menerus untuk digali dan diberdayakan yaitu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan kaum manula (masyarakat lanjut usia) harus ikut dilibatkan dan dipahamkan. Diberdayakan dalam anti filosofi hidup di masyarakat, pendidikan, keterampilan, sikap/tata krama, aturan bermasyarakat, adat, bahkan sampai pada penampilan masyarakat itu sendiri.

1. Filosofi hidup di masyarakat

Filosofi hidup di masyarakat perlu diarahkan dan diperhatikan, agar sesuai dengan filosofi pembangunan kepariwisataan karena apabila belum selaras akan menjadi ganjalan dan kendala. Mindset masyarakat dalam memandang tamu atau wisatawan harus diubah yang tadinya wisatawan sebagai saingan diubah menjadi aset dan sumber kehidupan. Perlu disadarkan bahwa wisatawan yang datang adalah masyarakat yang membawa biaya/uang yang akan dibelanjakan dan dapat menambah kesejahteraan masyarakat dan akan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan. Harus ditanamkan pada masyarakat bahwa tamu atau turis merupakan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melayani agar tamu menjadi betah dan berlama-lama tinggal di tempat wisata.

2. Pendidikan generasi muda

Pendidikan sebagai media yang ampuh untuk menyiapkan generasi muda untuk melayani dan memenuhi kebutuhan

**HAND OUT MATA KULIAH CONCEPT RESORT AND LEISURE,
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RESORT AND
LEISURE**

GUMELAR S. SASTRAYUDA (2010)

informasi bagi wisatawan, baik informasi mengenai kondisi fisik dan daerah maupun kultural yang berkembang di masyarakat. Pendidikan yang ditekankan adalah pendidikan yang dapat memelihara kelestarian objek dan budaya, agar menjadi aset dan jasa yang bisa dijual. Banyak informasi yang terkandung di lokasi pariwisata (objek) tidak dapat dijual karena keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat pariwisata. Bentuk pendidikan yang perlu dikembangkan baik berupa pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Untuk dapat menjelaskan kepada wisatawan secara lengkap dan benar maka diperlukan pengetahuan dan ilmu yang cukup mengenai berbagai kondisi alam dan historisnya, sehingga menjadi bekal dan pengetahuan yang berguna bagi pengunjung.

3. Keterampilan masyarakat

Keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai kunci pengembangan kepariwisataan. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan dalam menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan, baik berupa keterampilan dalam menerima atau keterampilan dalam menyuguhkan berbagai atraksi maupun informasi yang dibutuhkan, sampai pada keterampilan dalam membuat berbagai cinderamata yang khas dan yang diminati oleh wisatawan. Keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sangat berkaitan erat dengan kreativitas dan ide-ide atau gagasan yang dimiliki oleh masyarakat, oleh karena itu pembinaan kreativitas harus selalu dipupuk dan dikembangkan.

4. Sikap/tata karma

Sikap/tata krama sangat berkaitan dengan filosofi yang dipegang oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu apa bila filosofinya sudah disesuaikan maka sikap dan tata kramanya pun akan sesuai. Masyarakat yang ada di sekitar objek atau tempat wisata ibarat tuan rumah yang sedang menerima tamu. Apabila tuan rumah memiliki sikap dan tata krama yang baik akan menyebabkan tamu menjadi betah dan mau tinggal berlama-lama di tempat wisata. Pada dasarnya pariwisata akan berkembang dengan baik apabila wisatawan memiliki waktu kunjungan yang lama dan mau tinggal di tempat wisata, artinya tamu akan banyak mengeluarkan biaya atau uang di tempat wisata. Oleh karena itu perlu secara terus menerus membina sikap/tata krama masyarakat ke arah yang lebih baik. Memang tidak berarti masyarakat sekitar daerah wisata harus merubah sikap/tata krama sesuai dengan sikap/tata krama yang dimiliki wisatawan melainkan harus menunjukkan kemuliaan agar wisatawan menjadi betah dan merasa aman di tempat wisata.

5. Aturan bermasyarakat

Banyak kalangan yang memandang jika pariwisata berkembang maka aturan bermasyarakat semakin longgar dan rusak. Pandangan semacam ini keliru dan perlu diluruskan, mestinya aturan bermasyarakat dapat dikemas menjadi daya tarik wisata, dan kadang-kadang wisatawan merasa tertarik dan ingin mempelajari aturan bermasyarakat yang dipegang teguh. Tidak berarti memaksa wisatawan untuk mengikuti aturan bermasyarakat yang ada di tempat wisata, tetapi menjadi media pendidikan bagi para wisatawan akan kemuliaan dan keunggulan aturan bermasyarakat yang dikembangkan.

**HAND OUT MATA KULIAH CONCEPT RESORT AND LEISURE,
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RESORT AND
LEISURE**

GUMELAR S. SASTRAYUDA (2010)

6. Adat

Adat merupakan aset wisata, sehingga adat yang baik perlu terus dikembangkan dan diperkenalkan. Misalnya berbagai kepercayaan atau upacara yang dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat. Banyak wisatawan yang ingin datang ke suatu lokasi wisata yang hanya tertarik oleh berbagai keunikan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Adat biasanya muncul tidak serta-merta melainkan merupakan suatu hasil proses kehidupan bermasyarakat yang cukup panjang sepanjang kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga mengandung berbagai filosofi hidup dan mengandung nilai-nilai pendidikan yang luar biasa.

7. Penampilan

Penampilan merupakan akumulasi dari berbagai pemahaman dan pengetahuan termasuk keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, cerminan dari akumulasi tersebut akan nampak berupa penampilan sikap dan aura jiwa dari masyarakat tersebut. Pencitraan berupa penampilan masyarakat maupun penampilan lingkungan yang ada juga merupakan suatu daya tarik yang tidak kalah pentingnya dalam mendatangkan dan ketertarikan wisatawan. Oleh karena itu perlu dipelihara dan dipertahankan terutama penampilan yang membuat wisatawan merasa aman, tenteram, dan menimbulkan semangat hidup untuk berkarya dan bersikap ke arah yang lebih baik.

8. Partisipasi Masyarakat

Pola pembinaan pemberdayaan masyarakat menitikberatkan kepada partisipasi masyarakat, agar masyarakat dapat diajak terlibat guna mengarahkan kegiatan yang berhubungan langsung dengan mereka yang berkaitan dengan :

- a. Perumusan persoalan lebih efektif
- b. Mendapatkan informasi dan pemahaman realitas sumber asli.
- c. Merumuskan alternatif penyelesaian masalah secara sosial diterima
- d. Menumbuhkan rasa memiliki terhadap rencana sehingga memperlancar rencana sehingga memperlancar penerpaan
- e. Menghindari pertentangan yang tajam
- f. Menggalang swadaya akan lebih mudah
- g. Memperkuat posisi pemberdayaan masyarakat agar setara dengan para stakeholder kuat.

5. Tahap-tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri dan dilepas untuk mandiri, dengan demikian pemberdayaan melalui satu proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Oleh karena pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2004:83), meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

**HAND OUT MATA KULIAH CONCEPT RESORT AND LEISURE,
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RESORT AND
LEISURE**

GUMELAR S. SASTRAYUDA (2010)

2. Tahap, transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan
 3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan INOVATIF untuk mengantarkan kepada kemandirian.
1. Tahapan pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini para pelaku pemberdayaan masyarakat berusaha menciptakan prakondisi agar dalam tahap ini dapat mencapai kesadaran tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Tahap ini merangsang pula kesadaran dan kemauan belajar dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan, dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi.
 2. Tahap kedua adalah tahap kelanjutan pertama, jika tahap pertama telah terkondisi, maka tahap kedua adalah tahap dimana masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan, kecakapan, keterampilan yang memiliki hubungan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Dengan demikian menguasai kecakapan, pada tahapan ini masyarakat hanya menjadi pengikut, yaitu sekedar menjadi obyek pembangunan saja, belum menjadi subyek pembangunan.
 3. Tahap ketiga merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas, kecakapan dan keterampilan yang diperlukan, agar mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian.

Kemandirian tersebut akan diwujudkan dalam bentuk inovasi,

**HAND OUT MATA KULIAH CONCEPT RESORT AND LEISURE,
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RESORT AND
LEISURE**

GUMELAR S. SASTRAYUDA (2010)

kreativitas, inisiatif dan kreasi-kreasi dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah sampai pada tahap ini, masyarakat akan menjadi pemeran utama dalam berbagai konteks pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan. Namun, demikian dalam konteks pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, maka tahapan-tahapan pemberdayaan yang berkaitan dengan kedewasaan sikap masyarakat, merupakan tahapan yang perlu dicermati secara seksama mengingat dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat akan berproses secara bertahap, dalam waktu yang tidak singkat. Proses tahapan akan memberikan gambaran terhadap keterkaitan antara pengetahuan (know ledge), sikap (attitude) dan keterampilan (practice) dengan tahapan proses pemahaman masyarakat terhadap tahapan pembelajaran pada masing-masing tahapan Ambar Teguh Sulistiyani (2004:84-85), mengenai sikap kedewasaan masyarakat, pada masing-masing tahapan dapat diamati pada model perlakuan untuk meningkatkan aspek afektif, konitif, psikomotorik dan konatif.

Mengenai tahapan-tahapan yang mengarah kepada perubahan-perubahan seperti pada tahap afeksi sangat rendah usaha dibutuhkan penyuluhan untuk penyadaran, pada tahapan afeksi sangat rendah, tahap kognitif tidak berpengaruh, perlakuannya adalah pembelajaran untuk membuka wawasan bilamana afeksi dan kognitif dalam keadaan unskilled, akan berpengaruh kepada konatif. Pada tahap pertama bilamana afeksi sangat rendah secara linear berpengaruh kepada perlakuan kognitif, psikomotorik, dan konatif demikian pula pada tahap selanjutnya setiap tahapan akan selalu mengalami perubahan, sangat tergantung pada perubahan, sangat

**HAND OUT MATA KULIAH CONCEPT RESORT AND LEISURE,
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RESORT AND
LEISURE**

GUMELAR S. SASTRAYUDA (2010)

tergantung pada tingkat kesadaran. Komponen kognisi berkaitan dengan daya nalar/pikiran, gagasan/ide dan keyakinan. Sedangkan komponen afeksi berkaitan dengan perasaan, komponen konasi berkenaan sikap seseorang yang bertingkah laku sesuai dengan sikapnya.

Apabila kebiasaan sikap tersebut telah terbentuk dan tertanamkan pada masyarakat, maka tidak perlu lagi dipaksa atau, didorong untuk melakukan sesuatu kesadaran akan pentingnya perubahan kemandirian akan tumbuh dengan sendirinya, sejalan dengan itu dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat pariwisata, tentunya tahapan-tahapan demi tahapan dibutuhkan waktu untuk mencapai perubahan-perubahan.

6. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada umumnya sejumlah kalangan sepakat perlu dikembangkan partisipasi sebagai upaya menyertakan masyarakat seluas-luasnya yang mendorong, berkembangnya proses kebersamaan. Munculnya proses partisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendasarkan atas dua pendekatan. Pertama; pelibatan masyarakat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga dengan demikian adanya jaminan pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan. Kedua; membuat umpan balik yang pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terlepas dari kegiatan pembangunan.

Mikkelsen (1999), mengidentifikasi ada dua penggunaan partisipasi yaitu sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan sebagai alat mengembangkan diri. Keduanya merupakan satu kesatuan yang

**HAND OUT MATA KULIAH CONCEPT RESORT AND LEISURE,
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RESORT AND
LEISURE**

GUMELAR S. SASTRAYUDA (2010)

satu bersifat partisipasi transformasional dan yang lain bersifat partisipasi instrumental.

Partisipasi merupakan cara sederhana yang dapat dilakukan atau biasa dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Partisipasi transformasional, satu bentuk partisipasi yang memiliki tujuan untuk merubah kondisi yang lemah dan marjinal menjadi berdaya dan mandiri. Partisipasi semacam ini terkait dengan agenda-agenda besar seperti pembangunan kebudayaan yang berkaitan dengan situs-situs, kawasan wisata budaya, dan lain-lain, sedangkan partisipasi instrumental diartikan sebagai alat operasional yang terkait dengan cara-cara memadukan persepsi, aspirasi, merumuskan perencanaan, mengumpulkan sumber daya dan mengelola pelaksanaan kegiatan.

Dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat dibidang pariwisata. Kedua bentuk partisipasi tersebut baik transformasional dan instrumental perlu dikembangkan, mengingat pada tahap transformasional, partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam membentuk gagasan besar yang mampu menggalang kesadaran untuk perubahan dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan, mengingat pembangunan kepariwisataan memiliki titik singgung multidimensional yang keberhasilan pembangunannya banyak mengandalkan hasil dari sektor pembangunan lainnya. Disamping itu pengayaan kesadaran dan tanggung jawab bersama merupakan upaya yang harus terus digalang sebagai penggerak proses partisipasi.

Partisipasi instrumental merupakan bentuk yang secara proses pembelajaran dalam masyarakat yang bergerak dibidang pariwisata, merupakan cara-cara yang mendorong untuk merumuskan permasalahan secara efektif seperti dalam perumusan

**HAND OUT MATA KULIAH CONCEPT RESORT AND LEISURE,
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RESORT AND
LEISURE**

GUMELAR S. SASTRAYUDA (2010)

rencana pengembangan kebudayaan dan pariwisata, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap rencana dan memperlancar dalam pelaksanaannya dan dapat mengurangi pertentangan, karena sejak awal telah terjadi kesepakatan dengan demikian akan memperkuat posisi pemberdayaan masyarakat agar setara dengan para pelaku lainnya. Partisipasi sudah menjadi bahasa baku masyarakat dan sudah merupakan kebiasaan sehari-hari masyarakat dan menjadi pengetahuan dan pengalaman masyarakat, hanya saja dalam pelaksanaannya dibutuhkan fasilitator yang dapat mengkondisir dan merumuskan berbagai kegiatan dan permasalahan, baik program maupun data dan fakta. Proses belajar adalah merupakan langkah yang penting dalam partisipasi.

7. Kemitraan Dalam Memperkuat Jaringan Usaha Pariwisata

Kemitraan merupakan kesatuan hubungan antar pelaku pembangunan yang saling menghargai dalam mengembangkan potensi bersama agar dapat saling menguntungkan (mutual benefits) dalam rangka memperkuat kemandirian, bukan ketergantungan. Kemitraan dalam kaitannya dengan pengembangan kebudayaan dan pariwisata dapat diartikan sebagai upaya membangun kekuatan sosial dan pertumbuhan ekonomi pariwisata yang ditandai dengan indikator-indikator peningkatan kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, dan lama tinggal wisatawan. Kekuatan sosial dan pertumbuhan ekonomi tersebut dengan bertumpukan pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan antara lainnya rumah tangga miskin dan usaha kecil (UKM).

Dalam pola kemitraan tersebut di atas pada dasarnya perlu didasari oleh beberapa komitmen diantara pelaku kemitraan untuk

**HAND OUT MATA KULIAH CONCEPT RESORT AND LEISURE,
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RESORT AND
LEISURE**

GUMELAR S. SASTRAYUDA (2010)

menciptakan kerjasama dan saling mempercayai antara pelaku dan mengembangkan sikap tanggap dalam pengelolaan program pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan, disamping itu dengan kemitraan perlu diciptakan sinergi melalui jaringan dan komunikasi informasi, pengetahuan dan pengalaman.

Dalam proses pemberdayaan dibidang pengambilan keputusan, pemerintah sebaiknya memberikan fasilitas sistem edukasi masyarakat, dengan cara:

1. Memberikan ruang yang lebar kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, ide, masukan, kritik merasa keberatan tanpa dibebani sangsi dan ancaman.
2. Memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat
3. Pelibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan dengan melihat profesionalisme, kompetensi disamping nilai kepentingan masyarakat terhadap program pemberdayaan

Sedangkan dalam hal pendanaan pemerintah lebih melandaskan kebijakan dalam hal membangun permodalan dengan mempersatukan suatu bangunan struktur sosial yang dapat menjadi permasalahan dalam sistem investasi, aliran dana, dan tumbuh berkembangnya basis perekonomian, dengan demikian ekonomi rakyat diharapkan dapat berkembang secara merata.

Peran dunia usaha lebih banyak mengambil peran dalam hal implementasi penentuan langkah/policy action bersama masyarakat. Peran dunia usaha dalam implementasi kebijakan pemberdayaan mencakup juga kontribusi dana melalui investasi yang bermanfaat untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat, disamping itu dukungan terhadap berbagai pelaksanaan program yang menjadi kebijakan pemerintah berupa pemanfaatan tenaga ahli serta teknologi memadai.

**HAND OUT MATA KULIAH CONCEPT RESORT AND LEISURE,
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RESORT AND
LEISURE**

GUMELAR S. SASTRAYUDA (2010)

Secara umum peran masyarakat lebih menitikberatkan kepada partisipasi. Tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan akan berdasarkan pada tingkat keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat dan kemampuan pemahaman pada setiap level dalam proses kebijakan public. Pada dasarnya tidak semua masyarakat sudah mampu memberikan saran, kritik, ide dan sebagainya. Peran lain dapat digali adalah partisipasi dibidang pendanaan. Pengerahan dana masyarakat sering kali dilakukan sebagai perbandingan kemampuan masyarakat terhadap pendanaan dalam satu kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, sumber pendanaan yang dihimpun masyarakat lebih populer disebut dengan swadaya masyarakat. Peran masyarakat yang lain adalah memiliki fungsi pada kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Dalam mengembangkan ketiga peran dalam pemberdayaan masyarakat pariwisata, maka hal-hal yang paling penting dan mendasar adalah semangat gotong royong diantara ketiga peran tersebut, oleh karena itu dalam kemitraan dengan masyarakat tidak hanya terbatas dalam SDM atau pengarahan tenaga kerja semata akan tetapi sejauh mana memposisikan pengembangan kebudayaan dan pariwisata sebagai subyek pembangunan. Swadaya masyarakat merupakan dasar yang cukup kuat namun kenyataannya dalam pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan, swadaya masyarakat untuk membangun kekuatan di sektor tersebut masih dirasakan jauh memadai, dan masih peranannya dimiliki oleh sektor usaha swasta, terutama dalam pemberdayaan pariwisata yang mampu mengundang kesadaran dan inisiatif masyarakat dalam membangun kepariwisataan yang dapat menguntungkan bagi kesejahteraan mereka.

**HAND OUT MATA KULIAH CONCEPT RESORT AND LEISURE,
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RESORT AND
LEISURE**

GUMELAR S. SASTRAYUDA (2010)

8. Kemitraan Lintas Pelaku dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses kemitraan pemberdayaan masyarakat terdapat berbagai komponen yang terlibat dan memegang peranan sebagai pelaku kemitraan pemberdayaan masyarakat, para pelaku tersebut diantaranya: pemerintah, pakar, dunia usaha, LSM, dan masyarakat. Dalam menjalin kemitraan diantara unsur-unsur tersebut membuat jaringan-jaringan kerja efektif dan efisien untuk tercapai keuntungan bersama melalui berbagai dimensi kegiatan antara lain kegiatan pengembangan usaha ekonomi rakyat, penguatan modal sosial masyarakat. Dalam jaringan kerja kemitraan tersebut pada dasarnya lebih menitikberatkan kepada bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh setiap komponen pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat yang tidak mampu dan belum berdaya menjadi berdaya, oleh karena itu dalam fase kegiatan pengembangan usaha ekonomi rakyat. Tergambarkan tiga unsur penting adalah produksi rakyat, hasil yang dicapai rakyat dan dapat memberikan kehidupan. Pengelolaan pasca produksi mampu mengembangkan keuntungan melalui inovasi produksi dan pemasaran.